

Determinasi Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Pajak Restoran (Determination of Internal and External Factors on Restaurant Tax Compliance)

Ariyani Wijayanti, Septi Indira Kusuma, Agista Yolanda Putri, Salwa Febianti

Universitas Bangun Nusantara, Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendorari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, Indonesia.

DOI. <https://doi.org/10.61656/pmar.v6i2.455>.

ABSTRACT

Purpose: This study aims to examine the influence of taxpayer awareness, sanction perception, tax knowledge, and government service quality on restaurant tax compliance in Sidoarjo Regency. The research focuses on identifying which factors significantly drive compliance behavior among restaurant taxpayers.

Method: A quantitative approach was employed using survey data collected from restaurant taxpayers in Sidoarjo. Hypothesis testing was conducted through the t-test to analyze the partial effects of each independent variable on tax compliance.

Findings: The results reveal that taxpayer perception of sanctions and government service quality significantly affect restaurant tax compliance. Specifically, sanction perception has a positive effect, indicating that stronger perceived sanctions increase compliance. Conversely, government service quality shows a negative effect, suggesting that taxpayer compliance decreases when government services are perceived as inadequate. Meanwhile, taxpayer awareness and tax knowledge do not exhibit significant effects on compliance.

Implication: These findings highlight the importance of strengthening sanction enforcement and improving the quality of government services to enhance tax compliance. Policymakers should consider designing strategies that balance deterrence with supportive service delivery to encourage voluntary compliance among restaurant taxpayers.

Originality: This study contributes to the literature by providing empirical evidence from Sidoarjo Regency, emphasizing the paradoxical role of government service quality and the moderating influence of sanction perception. The research offers new insights into the behavioral dynamics of tax compliance in the restaurant sector within a developing country.

Keywords: taxpayer, sanction, government service quality, restaurant tax, Sidoarjo.

ABSTRAK

Tujuan: Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan pemerintah terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor mana yang secara signifikan mendorong perilaku kepatuhan di kalangan wajib pajak restoran.

Metode: Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menggunakan data survei yang dikumpulkan dari wajib pajak restoran di Sidoarjo. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji-t untuk menganalisis pengaruh parsial dari setiap variabel independen terhadap kepatuhan pajak.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi dan kualitas pelayanan pemerintah secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak restoran. Secara khusus, persepsi sanksi memiliki pengaruh positif, menunjukkan bahwa persepsi sanksi yang lebih kuat meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, kualitas pelayanan pemerintah menunjukkan pengaruh negatif, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak menurun ketika pelayanan pemerintah dianggap tidak memadai. Sementara itu, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Implikasi: Temuan ini menyoroti pentingnya memperkuat penegakan sanksi dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk merancang strategi yang menyeimbangkan pencegahan dengan penyampaian pelayanan yang mendukung untuk mendorong kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak restoran.

Orisinalitas: Studi ini berkontribusi pada literatur dengan memberikan bukti empiris dari Kabupaten Sidoarjo, menekankan peran paradoks kualitas layanan pemerintah dan pengaruh moderasi persepsi sanksi. Penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang dinamika perilaku kepatuhan pajak di sektor restoran dalam negara berkembang.

Kata Kunci: wajib pajak, sanksi, kualitas layanan pemerintah, pajak restoran, Sidoarjo.

Article info: Received: May 29, 2025; Revised: June 07, 2025; Accepted: June 26, 2025



This is an open-access article. **Public Management and Accounting Review** is a journal licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Correspondence:

* Ariyani Wijayanti and Email: aryn.3d071208@gmail.com

Recommended citation:

Wijayanti, A., Kusuma, S. I., Putri, A. Y., & Febianti, S. (2025). Determinasi Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Pajak Restoran (Determination of Internal and External Factors on Restaurant Tax Compliance), *Public Management and Accounting Review (PMAR)*, 6 (2), pp 50-61.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu isu sentral dalam sistem perpajakan modern, terutama di sektor pajak daerah seperti pajak restoran. Pajak restoran berperan penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, fenomena yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran masih belum optimal. Banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara penuh, baik karena kurangnya kesadaran, pemahaman, maupun persepsi terhadap sanksi yang berlaku (Nurdiana et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki potensi besar dari sektor kuliner dan restoran.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor fundamental dalam mendorong kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berhubungan positif dengan kepatuhan, karena individu yang sadar akan pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pandeiro et al., 2025). Kesadaran ini dapat tumbuh melalui edukasi, sosialisasi, dan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan.

Selain kesadaran, persepsi wajib pajak terhadap sanksi juga memengaruhi kepatuhan. Sanksi perpajakan yang jelas dan tegas berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku wajib pajak. Ketika wajib pajak menyadari adanya konsekuensi nyata atas pelanggaran, mereka lebih terdorong untuk patuh. Penelitian di sektor pajak restoran menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan secara konsisten mampu meningkatkan kepatuhan (Pahala et al., 2022). Dengan demikian, persepsi terhadap sanksi menjadi salah satu variabel penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan.

Pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan juga berperan besar. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan akan lebih mudah melaksanakan kewajiban dengan benar dan menghindari kesalahan administratif. Pengetahuan pajak terbukti sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah (Santosa et al., 2025). Pemahaman yang baik tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membangun moral pajak yang lebih kuat, karena wajib pajak merasa lebih percaya diri dalam menjalankan kewajiban.

Faktor eksternal yang tidak kalah penting adalah kualitas pelayanan pemerintah. Pelayanan yang baik, transparan, dan responsif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa dihargai dan didukung dalam melaksanakan kewajiban. Sebaliknya, pelayanan yang kurang memadai dapat menurunkan motivasi wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sinaga et al., 2021). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi strategi penting dalam mendorong kepatuhan pajak restoran.

Gap penelitian muncul karena masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan faktor kesadaran, persepsi sanksi, pemahaman, dan pelayanan pemerintah dalam konteks lokal seperti Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di kota besar, sementara daerah dengan pertumbuhan restoran yang pesat seperti Sidoarjo belum banyak diteliti. Padahal, karakteristik sosial-ekonomi dan budaya lokal dapat memengaruhi perilaku wajib pajak secara unik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan bukti empiris dari konteks Sidoarjo.

Novelty penelitian ini terletak pada integrasi empat variabel utama—kesadaran wajib pajak (X1), persepsi sanksi (X2), pemahaman perpajakan (X3), dan pelayanan pemerintah (X4)—dalam satu model empiris yang mengkaji kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti faktor internal wajib pajak, tetapi juga faktor eksternal berupa pelayanan pemerintah. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak restoran.

Kontribusi penelitian ini bersifat multidimensi. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan Theory of Planned Behavior dengan memasukkan variabel pelayanan pemerintah sebagai faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan. Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti baru dari konteks lokal Sidoarjo, yang dapat dibandingkan dengan hasil riset di daerah lain. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara penegakan sanksi dan peningkatan kualitas pelayanan. Secara sosial-ekonomi, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan PAD melalui strategi kepatuhan yang lebih efektif, sehingga mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo. Hasil penelitian ini relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi perpajakan. Melalui pendekatan integratif, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor restoran, sekaligus memperkuat basis penerimaan daerah.

KAJIAN LITERATUR

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang dapat dijelaskan melalui berbagai teori perilaku, salah satunya *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap sanksi, pemahaman perpajakan, serta kualitas pelayanan pemerintah dapat dipandang sebagai faktor yang membentuk niat dan perilaku kepatuhan (Ajzen, 2020). Selain itu, *Slippery Slope Framework* menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh interaksi antara kekuatan otoritas (*power of authorities*) dan kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authorities*). Sanksi mencerminkan kekuatan otoritas, sementara pelayanan pemerintah mencerminkan aspek kepercayaan. Dengan demikian, integrasi kedua teori ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo.

Theory of Planned Behavior dan Keterkaitan dengan Kepatuhan Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991; 2020) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap wajib pajak terhadap pajak mencerminkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan. Norma subjektif mencerminkan tekanan sosial atau lingkungan, misalnya dorongan dari komunitas bisnis atau asosiasi restoran untuk patuh terhadap pajak. Sementara itu, *perceived behavioral control* terkait dengan persepsi wajib pajak mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajak, yang dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pemerintah maupun persepsi terhadap sanksi.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa TPB relevan untuk menjelaskan kepatuhan pajak di berbagai sektor. Misalnya, studi oleh Nurdiana et al. (2025) menegaskan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan kualitas pelayanan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Santosa et al. (2025) juga menekankan bahwa pengetahuan pajak memperkuat sikap positif wajib pajak, sehingga meningkatkan niat untuk patuh. Dengan demikian, TPB memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana faktor internal (kesadaran dan pemahaman) serta faktor eksternal (sanksi dan pelayanan pemerintah) membentuk niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Slippery Slope Framework dan Keterkaitan dengan Kepatuhan Pajak

Teori *Slippery Slope Framework* dikembangkan oleh Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak melalui dua dimensi utama: kekuasaan otoritas pajak (*power of authorities*) dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust in authorities*). Model ini berasumsi bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada penegakan hukum dan sanksi, tetapi juga pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Ketika otoritas pajak memiliki kekuasaan yang kuat dan mampu menegakkan aturan secara konsisten, maka kepatuhan yang muncul bersifat *enforced compliance* (Warastri & Suryaningrum, 2022). Sebaliknya, ketika wajib pajak memiliki kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak, kepatuhan yang terbentuk bersifat *voluntary compliance* (Amalia, 2021).

Perpajakan daerah, seperti pajak restoran di Sidoarjo, kedua dimensi tersebut berperan saling melengkapi. Kekuasaan otoritas tercermin melalui penerapan sanksi yang tegas dan sistem pengawasan yang efektif, sedangkan kepercayaan dibangun melalui pelayanan pemerintah yang

transparan, cepat, dan responsif. Penelitian oleh [Linawati dan Djaddang \(2024\)](#) menunjukkan bahwa kombinasi antara kekuasaan dan kepercayaan menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ketika wajib pajak merasa bahwa pemerintah bertindak adil dan profesional, mereka cenderung patuh tanpa paksaan. Sebaliknya, jika kepercayaan menurun, maka otoritas perlu memperkuat aspek kekuasaan melalui sanksi dan penegakan hukum.

[Aulia, Rosdiana, dan Inayati \(2022\)](#) menegaskan bahwa *Slippery Slope Framework* relevan untuk menjelaskan kepatuhan pajak korporasi maupun individu, karena model ini menggabungkan pendekatan psikologis dan institusional. Dalam penelitian ini, variabel persepsi sanksi (X2) merepresentasikan power of authorities, sedangkan pelayanan pemerintah (X4) mencerminkan trust in authorities. Integrasi kedua variabel tersebut diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak restoran terbentuk melalui keseimbangan antara kekuasaan dan kepercayaan. Dengan demikian, *Slippery Slope Framework* menjadi landasan teoritis yang kuat untuk memahami perilaku kepatuhan pajak dalam konteks lokal Sidoarjo.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mencerminkan pemahaman individu bahwa pajak adalah kewajiban moral dan hukum. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih patuh karena menyadari kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak restoran ([Pandeiro et al., 2025](#)). Dengan demikian, kesadaran menjadi variabel penting dalam mendorong kepatuhan.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo.

Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku wajib pajak. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi yang tegas dan konsisten akan meningkatkan kepatuhan, karena adanya konsekuensi nyata atas pelanggaran. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa sanksi perpajakan berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan ([Pahala et al., 2022](#)). Dalam kerangka TPB, sanksi memperkuat persepsi kontrol perilaku, sehingga mendorong niat untuk patuh.

H2: Persepsi wajib pajak tentang sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan memengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan kewajiban dengan benar. Pengetahuan pajak terbukti sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah ([Santosa et al., 2025](#)). Pemahaman yang baik tidak hanya mengurangi kesalahan administratif, tetapi juga meningkatkan moral pajak. Dalam kerangka TPB, pemahaman memperkuat sikap positif terhadap kepatuhan.

H3: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo.

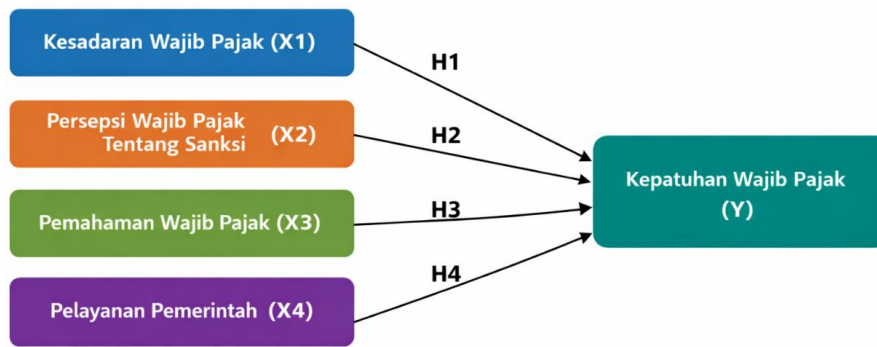
Pelayanan Pemerintah

Pelayanan pemerintah mencerminkan kualitas interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Pelayanan yang baik, transparan, dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas, sehingga mendorong kepatuhan ([Sinaga et al., 2021](#)). Dalam *Slippery Slope Framework*, pelayanan pemerintah menjadi faktor yang memperkuat trust in authorities, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, pelayanan pemerintah menjadi variabel eksternal yang penting dalam penelitian ini.

H4: Pelayanan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo.

Konseptualisasi Model Penelitian

Berdasarkan kerangka teori, penelitian ini mengembangkan model konseptual ([Gambar 1](#)) yang mengintegrasikan empat variabel independen (kesadaran, persepsi sanksi, pemahaman, dan pelayanan pemerintah) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Model ini berlandaskan pada TPB dan *Slippery Slope Framework*, yang menekankan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal wajib pajak dan faktor eksternal dari otoritas pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai determinan kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo.



Theory of Planned Behavior & Slippery Slope Framework

Gambar 1. Model Penelitian

Gambar 1 menampilkan empat variabel independen di sisi kiri (Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Sanksi, Pemahaman Wajib Pajak, dan Pelayanan Pemerintah) yang masing-masing dihubungkan dengan panah ke variabel dependen di sisi kanan, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Setiap panah diberi label hipotesis (H1–H4), dan kerangka teori yang mendasari dituliskan di bagian bawah: *Theory of Planned Behavior* dan *Slippery Slope Framework*.

Integrasi TPB dengan *Slippery Slope Framework* memperkaya analisis kepatuhan pajak. TPB menekankan aspek psikologis dan niat individu, sedangkan *Slippery Slope Framework* menekankan interaksi antara kekuasaan dan kepercayaan terhadap otoritas. Dalam penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan pemahaman wajib pajak (X3) merepresentasikan faktor internal yang membentuk sikap dan niat, sementara persepsi sanksi (X2) dan pelayanan pemerintah (X4) merepresentasikan faktor eksternal yang memengaruhi perceived behavioral control dan trust in authorities. Dengan menggabungkan kedua teori, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai determinan kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kesadaran wajib pajak (X1), persepsi wajib pajak tentang sanksi (X2), pemahaman wajib pajak (X3), dan pelayanan pemerintah (X4), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Desain penelitian ini dipilih karena mampu menguji hipotesis yang telah dikembangkan berdasarkan kerangka teori *Theory of Planned Behavior* dan *Slippery Slope Framework*.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Kabupaten Sidoarjo. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu, seperti wajib pajak restoran yang aktif membayar pajak dan terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sidoarjo. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh ukuran sampel yang representatif. Penentuan sampel ini sejalan dengan praktik penelitian perpajakan di Indonesia yang sering menggunakan pendekatan purposive untuk memastikan relevansi data (Nurdiana et al., 2025).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. Pertanyaan kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel:

- Kesadaran wajib pajak (X1): pemahaman bahwa pajak adalah kewajiban moral dan kontribusi pembangunan.
- Persepsi sanksi (X2): pandangan wajib pajak terhadap ketegasan, keadilan, dan konsistensi penerapan sanksi.
- Pemahaman wajib pajak (X3): pengetahuan tentang aturan, prosedur, dan manfaat pajak.
- Pelayanan pemerintah (X4): kualitas pelayanan, transparansi, dan responsivitas aparat pajak.
- Kepatuhan wajib pajak (Y): perilaku dalam melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Instrumen diuji melalui uji validitas (*Pearson Product Moment*) dan uji reliabilitas (*Cronbach's Alpha*). Instrumen dianggap valid jika nilai korelasi > 0,3 dan reliabel jika nilai alpha > 0,7 (Santosa et al., 2025).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Sebelum regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (p-value) dan koefisien regresi. Hipotesis diterima jika p-value < 0,05, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Analisis ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Sidoarjo.

Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan aspek etika dengan menjaga kerahasiaan identitas responden dan menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik. Responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak mereka untuk tidak menjawab pertanyaan yang dirasa sensitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Karakteristik Responden

Responden dari penelitian ini adalah pihak restoran di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan *self-assessment system* yaitu berjumlah 47 responden, dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan *simple random sampling*.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
<u>Gender:</u>		
• Laki-laki	21	44.7 %
• Perempuan	26	55.3 %
<u>Pendidikan Terakhir:</u>		
• SMA	8	17.0 %
• D-1	3	6.4 %
• D-2	2	4.3 %
• D-3	15	31.9 %
• S-1	19	40.4 %
Total Responden	47	100%

Sumber: Hasil Kuesioner diolah.

Karakteristik responden pada [Tabel 1](#), merupakan gambaran dari keberadaan responden yang menjadi sampel penelitian. Karakteristik responden dapat diketahui melalui identitas yang dicantumkan oleh responden pada kuesioner yang diberikan. Karakteristik responden ini didasarkan atas jenis kelamin dan pendidikan terakhir.

Berdasarkan [Tabel 1](#), mayoritas responden adalah perempuan dengan jumlah 26 orang atau 55.3%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 21 orang atau 44.7%. Sebanyak 19 orang pendidikan terakhirnya adalah S-1 atau sebesar 40.4%. Untuk D-3 sebanyak 15 orang atau 31.9%, untuk SMA

sebanyak 8 orang atau 17%, dan untuk D-1 sebanyak 3 orang atau 6.4%. Jumlah terkecil sebanyak 2 orang berpendidikan terakhir D-2 atau sebesar 4.3%, sedangkan yang berpendidikan terakhir S-2 dan S-3 tidak ada.

Hasil Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas pada, semua item pertanyaan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak valid, karena nilai r hitungnya lebih besar dari 0.30, sehingga semua item pertanyaan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (5 item), persepsi sanksi (6 item), pemahaman wajib pajak (10), pelayanan pemerintah (5), dan kepatuhan wajib pajak (8) dapat digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai Alpha pada seluruh variabel lebih besar dari 0.60, hal ini berarti seluruh variabel dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0.05. Dengan demikian disimpulkan bahwa data kelima variabel mengikuti sebaran normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Uji asumsi klasik untuk persamaan regresi berganda meliputi pengujian multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi menghasilkan keputusan yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Uji multikolinieritas dengan nilai VIF dan *tolerance* menunjukkan semua variabel memiliki angka kurang dari 10, demikian pula nilai *tolerance* semua variabel menunjukkan angka lebih besar dari 0.10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas atau asumsi tidak ada multikolinieritas terpenuhi.

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW-test). Hasilnya diperoleh nilai uji *Durbin Watson* sebesar 1.617, yang terletak di antara 1.55 dan 2.46 atau terletak di daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak ada autokorelasi dipenuhi.

Uji heterokedastisitas dengan cara menghitung korelasi *Rank Spearman* antara unstandardized residual dengan seluruh variabel bebas. Nilai signifikansi Korelasi *Rank Spearman* untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi, Pemahaman Wajib Pajak dan Pelayanan Pemerintah lebih besar dari 0.05, yang berarti tidak terdapat korelasi antara residual dengan variabel bebasnya. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi tidak ada heteroskedastisitas terpenuhi.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau *R-square* menunjukkan prosentase seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Berdasarkan Tabel 2, nilai *R-Square* sebesar 0.302, hal ini berarti bahwa perubahan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak tentang sanksi, pemahaman wajib pajak dan pelayanan pemerintah sebesar 30.2%, sedangkan sisanya sebesar 69.8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Tabel 2. Hasil Uji Determinasi *R-Square*

Model	R	R-Square	Adjusted R-Square	Std. Error of Estimate
1	0.550	0.302	0.236	0.60516

Sumber: Data diolah dengan SPSS.

Tabel 3. Hasil Uji F

	Jumlah Kuadrat	db	Kuadrat Tengah	F-hitung	Sig.
Regresi	6.668	4	1.667	4.552	0.004
Residual	15.381	42	0.366		
Total	22.049	46			

Sumber: Data diolah dengan SPSS.

Goodness of Fit (Uji F)

Berdasarkan Tabel 3, nilai F-hitung sebesar 4.552, sedangkan F-tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 4; db residual = 42) adalah sebesar 2.594. Nilai F-hitung > F-tabel yaitu $4.552 > 2.594$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi fit dan variasi variabel Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi, Pemahaman Wajib Pajak dan Pelayanan Pemerintah dapat memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji t antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0.343, sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 42) adalah sebesar 2.018, karena nilai t-hitung < t-tabel yaitu $0.343 < 2.018$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menduga bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak terbukti kebenarannya.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Parameter	Koefisien Regresi		t-hitung	Sig.
	bi	Std. Error		
Konstanta	4.189	0.717	5.845	0.000
Kesadaran Wajib Pajak	0.037	0.109	0.343	0.733
Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi	0.474	0.168	2.826	0.007
Pemahaman Wajib Pajak	-0.301	0.202	-1.489	0.144
Pelayanan Pemerintah	-0.409	0.114	-3.584	0.001

Sumber: Data diolah dengan SPSS.

Hasil uji t antara variabel Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2.826, sedangkan t-tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 42) adalah sebesar 2.018. Nilai t-hitung > t-tabel yaitu $2.826 > 2.018$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menduga bahwa terdapat pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti kebenarannya.

Hasil uji t antara variabel Pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t-hitung sebesar -1.489, sedangkan t-tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 42) adalah sebesar 2.018. Nilai mutlak |t hitung| < t tabel yaitu $1.489 < 2.018$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menduga bahwa terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak terbukti kebenarannya.

Hasil uji t antara variabel Pelayanan Pemerintah dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t-hitung sebesar -3.584, sedangkan t-tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 42) adalah sebesar 2.018. Nilai mutlak |t hitung| > t tabel yaitu $3.584 > 2.018$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pelayanan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menduga bahwa terdapat pengaruh pelayanan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti kebenarannya.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan fondasi utama dalam perilaku kepatuhan. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2020), kesadaran membentuk sikap positif terhadap perilaku membayar pajak. Wajib pajak yang menyadari bahwa pajak adalah kewajiban moral sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan daerah akan lebih cenderung patuh. Kesadaran ini tidak hanya terkait dengan pengetahuan formal, tetapi juga dengan nilai-nilai sosial yang menekankan pentingnya kontribusi terhadap masyarakat.

Penelitian terdahulu mendukung pandangan ini. Pandeiro et al. (2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di Tomohon. Nurdiana et al. (2025) juga menegaskan bahwa kesadaran merupakan salah satu faktor dominan dalam kepatuhan pajak daerah. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dapat dipandang sebagai variabel psikologis yang memperkuat sikap positif terhadap kepatuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kesadaran wajib pajak restoran di Sidoarjo berada pada kategori cukup tinggi (3.36). Hal ini menandakan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah memahami pentingnya pajak, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Implikasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat program edukasi berbasis komunitas dan kampanye publik yang menekankan pajak sebagai kontribusi sosial, bukan sekadar kewajiban hukum.

Pengaruh Persepsi Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi wajib pajak terhadap sanksi mencerminkan dimensi *power of authorities* dalam *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008). Sanksi yang tegas dan konsisten akan mendorong kepatuhan yang bersifat enforced compliance. Ketika wajib pajak menyadari adanya konsekuensi nyata atas pelanggaran, mereka lebih terdorong untuk patuh.

Penelitian sebelumnya mendukung hal ini. Pahala et al. (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Jakarta. Linawati dan Djaddang (2024) juga menegaskan bahwa kekuasaan otoritas melalui sanksi merupakan salah satu pilar kepatuhan pajak dalam *Slippery Slope Framework*. Dengan demikian, persepsi terhadap sanksi dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol yang efektif dalam mendorong kepatuhan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa rata-rata persepsi sanksi wajib pajak restoran di Sidoarjo cukup tinggi (3.87). Hal ini berarti sanksi dipandang efektif dalam mendorong kepatuhan. Implikasinya, pemerintah daerah perlu memastikan konsistensi penerapan sanksi agar kepatuhan tetap terjaga, sekaligus menghindari persepsi negatif terkait ketidakadilan.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan memperkuat sikap positif terhadap kepatuhan sebagaimana dijelaskan dalam TPB. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai akan lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban, sehingga meningkatkan niat untuk patuh. Pemahaman yang baik juga membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif dan meningkatkan moral pajak.

Penelitian terdahulu mendukung hal ini. Santosa et al. (2025) menegaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan, terutama pada sektor UMKM. Nurdiana et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak dapat dipandang sebagai variabel yang memperkuat sikap positif dan niat untuk patuh.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa rata-rata pemahaman wajib pajak restoran di Sidoarjo adalah 4.11, yang merupakan nilai tertinggi di antara variabel independen. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan. Implikasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat program pelatihan, sosialisasi teknis, dan digitalisasi informasi perpajakan agar wajib pajak semakin mudah memahami prosedur pembayaran pajak.

Pengaruh Pelayanan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan pemerintah mencerminkan dimensi *trust in authorities* dalam *Slippery Slope Framework*. Pelayanan yang baik, transparan, dan responsif akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas, sehingga mendorong kepatuhan yang bersifat voluntary compliance (Aulia et al., 2022). Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kepatuhan jangka panjang.

Penelitian terdahulu mendukung hal ini. Sinaga et al. (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan dan motivasi wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, pelayanan pemerintah dapat dipandang sebagai variabel eksternal yang memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pelayanan pemerintah di Sidoarjo relatif rendah (2,60), sehingga menjadi tantangan dalam mendorong kepatuhan pajak restoran. Implikasinya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi sistem, transparansi informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur pajak. Dengan pelayanan yang lebih baik, kepercayaan wajib pajak akan meningkat, sehingga kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela.

Implikasi Manajerial dan Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Pertama, aspek edukasi dan sosialisasi perlu diperkuat. Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan program sosialisasi berbasis komunitas, seminar, maupun kampanye publik yang menekankan pajak sebagai kontribusi sosial dan moral, bukan sekadar

kewajiban hukum. Edukasi yang berkelanjutan akan menumbuhkan sikap positif wajib pajak terhadap kepatuhan.

Kedua, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten harus dijaga. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi yang jelas terbukti mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa regulasi perpajakan ditegakkan secara adil dan konsisten, sehingga wajib pajak memiliki persepsi bahwa pelanggaran akan selalu berkonsekuensi. Penegakan hukum yang transparan akan memperkuat dimensi *power of authorities* dalam *Slippery Slope Framework*.

Ketiga, peningkatan pemahaman wajib pajak melalui pelatihan teknis dan digitalisasi informasi menjadi strategi yang sangat relevan. Pemahaman terbukti sebagai faktor dominan dalam penelitian ini, sehingga pemerintah daerah dapat menyediakan modul pelatihan, panduan digital, serta layanan konsultasi daring untuk membantu wajib pajak memahami prosedur pembayaran pajak dengan lebih mudah. Hal ini akan memperkuat sikap positif dan meningkatkan moral pajak.

Keempat, kualitas pelayanan pemerintah perlu ditingkatkan secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah masih relatif rendah, sehingga menjadi tantangan dalam mendorong kepatuhan. Digitalisasi sistem pelayanan, transparansi informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur pajak akan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas. Dengan pelayanan yang lebih baik, kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela, sesuai dengan dimensi *trust in authorities* dalam *Slippery Slope Framework*.

Secara keseluruhan, kebijakan yang menyeimbangkan antara edukasi, penegakan sanksi, peningkatan pemahaman, dan perbaikan pelayanan akan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak restoran. Strategi kebijakan yang seimbang ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh kesadaran, persepsi terhadap sanksi, pemahaman perpajakan, dan pelayanan pemerintah. Keempat variabel terbukti berpengaruh positif, dengan pemahaman wajib pajak sebagai faktor dominan. Temuan ini memperkuat kerangka *Theory of Planned Behavior* yang menekankan peran sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* dalam membentuk niat kepatuhan, serta *Slippery Slope Framework* yang menyoroti interaksi antara kekuasaan otoritas dan kepercayaan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak restoran di Sidoarjo dan menegaskan pentingnya keseimbangan antara faktor internal dan eksternal.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan penelitian hanya terbatas pada wajib pajak restoran di Sidoarjo, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik berbeda. Kedua, instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup berpotensi menimbulkan bias persepsi, karena responden mungkin memberikan jawaban yang dianggap sesuai dengan harapan peneliti. Ketiga, pendekatan kuantitatif yang digunakan belum menggali aspek kualitatif seperti motivasi personal atau pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan aparat pajak.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan populasi ke daerah lain agar hasil dapat dibandingkan secara lintas wilayah. Pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan survei kuantitatif dengan wawancara mendalam juga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai faktor-faktor kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pajak melalui digitalisasi sistem, transparansi informasi, dan pelatihan aparatur. Selain itu, program sosialisasi berbasis komunitas dapat memperkuat kesadaran wajib pajak, sementara penerapan sanksi yang konsisten akan menjaga kepatuhan.

Kontribusi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan *Theory of Planned Behavior* dengan memasukkan variabel pelayanan pemerintah sebagai faktor eksternal yang memengaruhi *perceived behavioral control*. Penelitian ini juga mengintegrasikan *Slippery Slope Framework* dengan konteks

lokal, di mana persepsi sanksi mencerminkan kekuasaan otoritas, sedangkan pelayanan pemerintah mencerminkan kepercayaan terhadap otoritas.

Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti baru dari konteks Sidoarjo, yang sebelumnya belum banyak diteliti, dan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara edukasi, penegakan sanksi, dan peningkatan pelayanan. Program sosialisasi pajak berbasis komunitas, pelatihan teknis, serta digitalisasi sistem pelayanan dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini menekankan pentingnya kombinasi antara kekuasaan dan kepercayaan. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi sanksi yang tegas sekaligus membangun pelayanan publik yang transparan dan responsif. Dengan strategi kebijakan yang seimbang, kepatuhan pajak dapat meningkat, sehingga mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan yang ditetapkan, yaitu menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi, pemahaman perpajakan, dan pelayanan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo. Kajian ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan, dengan pemahaman wajib pajak sebagai faktor dominan dan pelayanan pemerintah sebagai aspek yang masih perlu ditingkatkan. Temuan ini tidak hanya memperkuat landasan teoritis melalui *Theory of Planned Behavior* dan *Slippery Slope Framework*, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dan kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah.

Daftar Singkatan

TPB = Theory of Planned Behavior

PAD = Pendapatan Asli Daerah.

UMKM = Usaha Mikro Kecil Menengah

Kontribusi Penulis

Masing-masing penulis memberikan kontribusi yang sama dalam melakukan pengumpulan data, analisis data, dan interpretasinya termasuk dalam penulisan artikel ini.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Ketersediaan Data dan Material

Data hasil penyebaran kuesioner tersedia dalam arsip penelitian dan dapat diberikan kepada pihak terkait apabila diperlukan untuk kepentingan akademik dengan email ke penulis korespondensi disertai alasan permintaan data.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>.
- Amalia, F. A. (2021). Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak dan Kepatuhan Pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 92–101. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020>.

- Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model. *Sustainability*, 14(22), 14670. <https://doi.org/10.3390/su142214670>.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “Slippery Slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(2), 92–101. <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2.69>.
- Nurdiana, A., Maulina, A., Wahyudin, D., Zaini, Z., & Hendrarso, P. (2025). The influence of taxpayer awareness, tax knowledge, service quality, tax sanctions, and tax audits on tax compliance of restaurant taxpayers. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(5). <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4041>.
- Pahala, I., Hasanah, N., Prayoga, A. E., & Musyaffi, A. M. (2022). Restaurant taxpayer compliance: The role of social relations and tax sanctions. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 59–69. <https://doi.org/10.21009/JPEB.010.1.5>.
- Pandeiro, C. L. P., Kewo, C. L., & Kawulur, H. R. (2025). The effect of tax sanctions and taxpayer awareness on restaurant taxpayer compliance in Tomohon City. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(4), 147–155. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/239>.
- Santosa, A., Rahman, A., Fadillah, S., & Fadilla, S. (2025). The power of tax knowledge: Key factors to boost tax compliance. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(2), 141–154. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i2.1635>
- Sinaga, E. S., Rini, E. S., & Sembiring, B. K. F. (2021). Effect of service quality, satisfaction and awareness on taxpayer compliance. *International Journal of Research and Review*, 8(7). <https://doi.org/10.52403/ijrr.20210737>.
- Warastri, R. M. G. & Suryaningrum, D. H. (2022). Pengaruh tax avoidance, tax reporting aggressiveness, dan tax risk terhadap risiko perusahaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 895-908. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2081>